

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat
- Diantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999
- Djafar Saidi, Muhammad. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2012 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Sarundajang, 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Remaja Rosdakarya
- Syaukani dkk, 2017. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 16 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 42 Tahun 2019
tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kepada Guru dan Tenaga Pendidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan
Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan,
Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan
Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia
dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

C. Jurnal :

B. Tirie., J.J. Sondakh., S.K. Walandouw. 2016. *Analisis Efektivitas Dan
Kontribusi Penerimaan Pbb-P2 Sebagai Sumber Pad Di Kota: Tomohon,
Manado, dan Bitung*. Jurnal Pajak EMBA Vol.4 No.2.

Henny Juliani, dkk. 2016. *“Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Semarang”*. Diponegoro Law Jurnal, Jurnal Jilid
5 Nomor 3

Isipriyarso, Budi. 2018. *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan
Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jurnal Jilid 47 No. 3.

Muslih, M. 2013. “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*”, Jurnal Legalitas Volume IV Nomor 1

Nabitatus Sa’adah, *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.2, (Semarang: April, 2017), hlm. 185

D. Internet :

Nibras Nada Nailufar, “Pro-Kontra Anies Revisi Kebijakan Pembebasan PBB”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/25/09402391/pro-kontra-anies-revisi-kebijakan-pembebasan-pbb?page=all>, pada tanggal 10 Desember 2019.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>
Diakses pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 15.32 WIB.